

KEPEMIMPINAN MORALITAS DAN MORALITAS PEMIMPIN KILAS BALIK TINJAUAN PENDIDIKAN POLITIK PADA SISTEM ORGANISASI INTRA KAMPUS

Yadi Purwanto
Universitas Muhammadiyah Surakarta
yadipurwanto@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan politik di Indonesia diwarnai oleh ketidak-mantapan personal atau *split personality* yang ditunjukkan oleh para pemimpin politik. Kasus tidak setianya pemimpin atas janji-janji yang mereka ucapkan baik ketika kampanye, berjanji dan saat sumpah jabatan. Perilaku pemimpin yang menunjukkan ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan memicu tuduhan berbuat kebohongan oleh sebagian pihak seperti para tokoh terhadap presiden. Cacian terhadap perilaku legislatif dan politikus lebih mengarah kepada perilaku yang jauh dari moralitas seperti korupsi, suap, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat, melalaikan kewajiban, lemah dalam membela hak-hak publik membolos, mangkir, tidur saat sidang, pornografi dan *sex abuse*. Di sisi lain, masyarakat senantiasa berharap akan adanya Kepemimpinan Moralitas. Kepemimpinan Moralitas terkait dengan moralitas kepemimpinan yang tidak bersifat instans, karena merupakan hasil jangka panjang dari proses pembelajaran sejak kecil yang ditanamkan oleh lingkungan. Salah satu wahana belajar kepemimpinan yang strategis adalah organisasi kesiswaan dan organisasi intra kampus. Ketika sistem Pendidikan politik tidak memadai secara moralitas untuk menjadi wahana belajar maka sulit melahirkan pemimpin bermoral.

Kata kunci: Kepemimpinan; moralitas; pendidikan politik; proses pembelajaran.

PENDAHULUAN

Kondisi kepemimpinan Indonesia memasuki dwiwindu ditandai dengan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan dan kepemimpinan presiden, politisi dan para aparatur negara. "Sembilan Kebohongan" yang dilansir Tokoh Lintas Agama 10/01/2011. Selanjutnya dirilis survei Indo Barometer (Kompas, 16/5/2011) yang bertajuk "Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono" menunjukkan, 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya. Hasilnya merupakan pukulan bagi semua pihak yang menganggap reformasi sebagai momentum perubahan karena ironis orde reformasi gagal memberi solusi dibandingkan orde baru yang ditumbangkannya.

Padahal beberapa tahun lalu media massa diributkan dengan tema mempertemukan karakter Bung Karno dan Soeharto (Viktus dalam Repubika 14/03/2009). Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebanngsaan, menyatakan, Indonesia dapat kembali menjadi negara yang disegani dunia internasional, jika dipimpin tokoh kuat dengan perpaduan karakter kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Sosok pemimpin seperti Bung Karno dan Pak Harto dikriteriakan ideal oleh mayoritas rakyat Indonesia kini dan ke depan, yang diyakini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang tak hanya disegani, tetapi mampu membawa rakyatnya sejahtera dan makmur. Ironi sekali bahwa kedua pemimpin tersebut justru jatuh dan dijatuhkan, namun sekaligus dianggap “ratu adil” untuk membawa Indonesia maju dan mengemban fungsi negara sejahtera.

Salah satu bidikan sumber masalah yang menyebabkan menurunnya kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pelayanan negara terhadap rakyatnya yang selalu diungkapkan para pengamat, tokoh akademisi adalah masalah kepemimpinan dan karakter. Sudah 63 tahun merdeka belum berhasil melakukan pembangunan karakter (*character building*) yang merupakan unsur terpenting dan fundamental dalam pembangunan bangsa, terutama dalam hal kepemimpinan. Karut marutnya pembangunan bangsa sekarang ini salah satu penyebabnya yang paling fundamental adalah karena kepemimpinan nasional banyak dikendalikan oleh orang-orang yang gagal membangun karakter atau berkarakter minimalis. Karakter minimalis ditandai dengan ketidakmampuan mereka untuk tampil sebagai pribadi yang jujur, cerdas, tangguh, mandiri, berkepribadian luhur, peka terhadap penderitaan rakyat dan sebagainya. Akibatnya, dalam mengurus negara mereka mudah terjebak pada pragmatisme dan kepentingan sesaat (*vested interest*). Tidak heran jika cenderung korup, pamer, asal bicara, sok elitis, sok kebal terhadap hukum, tak peduli wong cilik, bertindak sewenang-wenang dan mudah menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Karakter Moral dan Kegagalan Dunia Pendidikan

Manusia berkarakter, sebagaimana yang dikatakan oleh Yudi Latif (*Kompas*, 20/5/2006) adalah manusia yang memiliki keunggulan khas, dapat diandalkan dan memiliki daya tahan dalam kesulitan dan persaingan. Untuk mencetak manusia yang seperti ini kuncinya jelas satu: pendidikan. Jadi, pada prinsipnya pendidikan merupakan kawah penggemblengan manusia-manusia unggul, tempat penggodokan manusia-manusia bermental dan berwatak tangguh, cerdas, berbudi luhur dan terampil. Karena fungsi

pendidikan sendiri sebenarnya adalah upaya mendayagunakan dan mengolah potensi intelektualitas (*head*), spiritualitas (*heart*) dan profesionalitas (*hand*). Pendayagunaan dan pengelolaan secara optimal tiga fakultas diri manusia itulah kunci untuk melahirkan manusia berkarakter.

Namun sayang sampai sekarang lembaga pendidikan kita sendiri masih kacau, penuh kepura-puraan, kepalsuan, citra, imagologi, pembohongan dan kedustaan. Bahkan yang terjadi sekarang justru pendangkalan pendidikan. Satu sisi pendidikan kita lebih memfokuskan diri pada hal-hal pendidikan yang sifatnya formalis-legalistik, namun sangat abai terhadap substansi pendidikan itu sendiri. Anak didik dipresur untuk meraih target nilai dalam UAN sebagai standardisasi kesuksesan sebuah pendidikan, tanpa memperhatikan potensi-potensi siswa lainnya yang lebih riil.

Faktor semacam itulah yang menyebabkan lembaga pendidikan gagal memberdayakan ketiga fakultas manusia di atas secara holistik sehingga akhirnya gagal melahirkan anak didik yang berkarakter. Pendidikan hanya mampu mencetak orang-orang yang nilai akademisnya bagus, namun moral dan intelektualnya bejat. Indikasinya adalah maraknya budaya korupsi. Para koruptor dewasa ini, menurut Abdreas Yumara (*Kompas*, 15/8/2008) merupakan buah yang dihasilkan oleh pohon dunia pendidikan kita yang penuh kepura-puraan. Pengaruh kepura-puraan, korupsi, kepalsuan dan kekerasan serta mutilasi, penculikan, penganiayaan, dan konflik berdarah yang dibawa oleh informasi yang begitu cepat membuat lingkungan kebanjiran informasi negatif tanpa peluang refleksi, proses edukasi dan internalisasi diri. Sementara di sisi lain, produk-produk dunia pendidikan kita tidak melek realitas dan tak mampu membrikan solusi terhadap problematika bangsa. Di balik kemegahan prestasi akademik dan formalisme citra yang mentereng justru menyimpan segudang teka-teki prihal kualitas pendidikan.

Dengan demikian artinya bahwa dunia pendidikan kita hingga sekarang tengah mengalami kegagalan untuk mencetak manusia-manusia berkarakter. Kegagalan mencetak manusia Indonesia yang berkarakter ini, pada hakekatnya, kegagalan fungsi dunia pendidikan itu sendiri.

Dunia pendidikan kita juga menghadapi persoalan, salah satunya adalah rendahnya minat mengikuti kegiatan keorganisasian seperti organisasi intra-ekstra sekolah (PII, OSIS, PMR, dan Pramuka) dan intra-ekstra kampus (HMI, IMM, KAMMI, BEM, dan ormawa lainnya). Padahal diyakini bahwa berorganisasi merupakan ajang melatih *soft-skill* seperti kepemimpinan. Itu dari sudut kuantitas kepesertaan kita kekurangan manusia yang mau belajar *soft-skill*. Di sisi lain organisasi belajar tersebut tidak sepenuhnya dikelola, dibina

dengan komitmen yang penuh sebagai lembaga kader yang membentuk karakter. Sehingga mereka hanya belajar berorganisasi tetapi kurang membangun karakter terutama moralitas. Ketika mereka terjun ke dalam organisasi luar kampus seperti LSM, partai politik, atau ormas, kita sering menyaksikan ironi pertunjukan dalam muktamar, pergantian pengurus atau ajang reorganisasi sering diwarnai rebutan jabatan, berkelahi, tawuran, pecah belah, rekayasa, tim sukses yang meniadakan peran orang lain. Tidak heran jika ketika mereka memimpin departemen, menjadi anggota dewan, pimpinan partai politik, lembaga negara, bahkan menjadi presiden sekalipun nuansa **anarkisme psikologis** dapat dilihat secara telanjang.

Karakter Pemimpin dan Moralitas

Wijaya, N. Purnomolastu, dan A.J. Tjahjoanggoro (2009) menyatakan pemimpin dengan segala beban yang diembannya tetap sangat menarik untuk diperbincangkan, diperdebatkan, sampai dituliskan dalam sebuah buku. Kekuatan, kekuasaan, kemasyhuran, kejayaan, pengaruh, dan kekayaan menjadi pemicu orang untuk menjadi pemimpin. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah semudah kita membicarakannya atau menuliskannya. Paling ekstrim, seorang calon pemimpin akan melakukan apa saja asal tujuannya tercapai. Menjadi seorang pemimpin, baik di level lembaga, organisasi, perusahaan maupun pemerintahan.

Ketika sang pemimpin telah menggenggam apa yang didambakannya berupa kekuasaan dan lainnya, maka akan terlihat jelas kapasitas dan karakter sang pemimpin. Apakah ia termasuk *the dream leader*, sang pemimpin amanah yang menebarkan hawa sejuk dan kepuasan bagi bawahan dan organisasi. Ataukah ia seorang diktator kolot yang takut akan perubahan dan keunggulan kompetitornya. Kepemimpinan yang muncul akan bersinergi atau berlawanan atau lahir dalam situasi politik sesuai dengan tuntutan jamannya. Kini era demokrasi, maka karakteristik pemimpin juga diperlukan dengan karakter tantangan jaman demokrasi, yaitu (Maulasadra, 2008): 1) **Keterbukaan** menuntut pemimpin yang tidak mudah marah, tetapi juga tidak mudah dipengaruhi; 2) **Kompetisi** menuntut pemimpin yang kerja keras untuk menang dalam persaingan terbuka; 3) **Ketidakpastian** menuntut pemimpin yang visioner dan punya argumen kuat untuk diperdebatkan secara publik; 4) **Kapitalisme** menuntut pemimpin yang tahan jebakan dan rayuan materialisme seperti kemewahan, korupsi, dan tekanan pemilik modal; 5) **Kebebasan** yang mengharuskan pemimpin yang punya pegangan moral yang kokoh sehingga tidak mudah diombang-ambingkan dengan nilai-nilai baru tanpa harus menjadi kaku.

Namun idealitas demokrasi yang diteorikan dan dipilih, faktanya justru menenggelamkan karakter jujur, tanpa pamrih, dan bertanggung jawab. Semua kedudukan dalam kepemimpinan di negeri ini menjadi hal yang sulit dicapai bagi manusia-manusia yang berkarakter baik. Kepemimpinan hanya akan diraih oleh mereka yang memiliki uang dan berani menggunakannya untuk membeli kekuasaan. Demokrasi tanpa sadar menjadikan bangsa ini memusuhi manusia-manusia berkarakter baik dan mencintai mereka yang berani membeli dan menjanjikan keuntungan materi. Hafiszh Shalih (2005) berpendapat dalam praktek bernegara sekarang ini demokrasi berarti milik pemilik modal, sehingga menjadi demokrasi kapitalis yang secara fakta menggiring munculnya pertentangan kelas antara penguasa kapitalis dengan kaum proletar yaitu rakyat itu sendiri. Adi Pribadi (2001) Kondisi demikian selalu menjadi titik tolak kalangan muda kampus untuk tampil. Mereka memobilisasikan diri melalui organisasi Kampus. Perubahan istilah ketua BEM universitas menjadi **presiden**, ketua departemen disebut **mentri**, Ketua BEM fakultas menjadi **gubernur** dan sebagainya. Perubahan sebutan politik jabatan-jabatan organisasi kampus mengindikasikan bahwa organisasi kampus merupakan miniatur politik negara dibandingkan kehidupan kampus dengan aktivitas intelektual. Perubahan ini diorientasikan untuk menjadikan organisasi intra kampus sebagai saran belajar politik.

Menata Kampus Sebagai Pusat Pendidikan Karakter Bermoral

Tempo (01/02/2011) menulis opini tentang pentingnya sistem pendidikan yang menghasilkan manusia sekarang ini. Para pakar pendidikan lebih awal memberi peringatan perlunya pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Peringatan tersebut disampaikan atas dasar kegalauan melihat realitas kehidupan yang terindikasi terjadinya degradasi moral. Merosotnya mental kolektif masyarakat berpengaruh terhadap jatuhnya wibawa sebagai bangsa di mata bangsa-bangsa lain. Dan terbukti, dalam berbagai hal, bangsa Indonesia tak bisa tampil di kancah internasional dengan kepala tegak.

Peringatan para pakar pendidikan itu direspons positif oleh pemerintah dengan merencanakan penerapan pendidikan karakter yang pelaksanaannya terintegrasi pada semua mata pelajaran di sekolah. Tidak kurang Kementerian Pendidikan Nasional di antaranya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuat kurikulum pendidikan karakter antikorupsi, yang mulai diterapkan pada 2011. Selain pendidikan antikorupsi, pendidikan tanggap bencana dan pendidikan tertib berlalu lintas diterapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi merosotnya nilai-nilai moralitas dalam tata kehidupan kolektif sebagai bangsa. Yudi Latief (2010) dan Wahid (2010) menengarai faktor internal adalah terjadinya perubahan sistem politik pascareformasi menimbulkan euforia

politik berlebihan, hilangnya ethos kepemimpinan karena Reformasi adalah puncak tampilnya pemimpin yang ternyata gagal menuntaskan reformasi. Kebebasan berdemokrasi nyaris tanpa batas, sampai mengabaikan nilai-nilai etika. Faktor eksternal adalah informasi dan intervensi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat arus informasi begitu deras. Nyaris tak ada lagi filter untuk memilih dan memilah. Norma-norma agama atau budaya nyaris tak mampu membendung informasi yang mendorong terjadinya degradasi moral. Apalagi norma hukum dan peraturan perundang-undangan mudah dibongkar-pasang, didekonstruksi dan direkonstruksi sesuai dengan kepentingan tertentu. Selain itu intervensi asing sejak awal benih reformasi melalui Letter of intent IMF (International Monetary Fund) dan masuknya liberalisasi konsep perundang-undangan di hampir semua sektor ekonomi, pendidikan dan politik, menyebabkan kapasitas kepemimpinan kita tidak sanggup menampung beban perubahan yang terlalu berat. Reformasi ternacam gagal.

Kepemimpinan Teladan Via Pendidikan

Opini Tempo (01/02/2011) menyimpulkan penetapan lembaga pendidikan menjadi "bengkel" bagi perbaikan moralitas bangsa bukan suatu hal yang salah. Keyakinan lembaga pendidikan adalah pilihan tepat sebagai garda terdepan pembentukan karakter bangsa, karena ia telah terbukti sangat kondusif untuk melaksanakan pembinaan sumber daya manusia. Kampus digelari menjadi agen perubahan, sayang sekedar pemero, yang ada kampus adalah sumber demonstran! Masyarakat terkotak-kotak bukan hanya dilakukan oleh partai politik, tapi juga oleh kaum intelektual persis angkatan dalam sastra, mengatasnamakan angkatan 66, angkatan 74, dan angkatan 98. Ironisnya, hal semacam itu menjadi kebanggaan tapi miskin konsep untuk pembangunan bangsa jauh ke depan.

Pendidikan sebagai agen perubahan adalah melalui proses yang sistematis dan terencana guna peningkatan kualitas sumber daya manusia berkarakter, sehingga mereka mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan melahirkan peradaban baru yang lebih bermartabat. Pemimpin harus bertekad mengambil inisiatif memprakarsai gerakan pendidikan karakter secara riil, melalui keteladanan. Bukan sekadar retorika dan topeng pencitraan.

Di tengah kondisi kepemimpinan yang minus keteladanan, menjadi menarik untuk direnungkan tekad Menteri Pendidikan Nasional yang mencanangkan pendidikan karakter melalui kurikulum di pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi pada tahun ajaran baru 2011/2012. Pendidikan karakter tersebut diwujudkan mulai dari kurikulum sampai dengan membangun budaya di sekolah. Melalui pendidikan karakter, diharapkan anak-anak

bangsa yang berada di lembaga-lembaga pendidikan menjadi sosok yang jujur dan bertanggung jawab. Sebuah pemikiran yang menemukan ruang dan momentum yang memadai dan tepat di tengah carut marutnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun permasalahannya adalah, apakah lembaga pendidikan mampu melakukan fungsi yang demikian berat untuk membentuk karakter manusia Indonesia di tengah minimnya keteladanan dari para pemimpin. Ketika nantinya lembaga-lembaga pendidikan telah bekerja dengan keras membentuk karakter anak bangsa yang jujur dan bertanggungjawab, apakah yang akan terjadi saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat yang tidak menghargai sikap-sikap jujur dan bertanggung jawab tersebut?

Tidakkah anak-anak bangsa akan mengalami kebingungan-kebingungan hebat karena mereka tidak menemukan relevansi antara pemahaman bahwa menjadi manusia berkarakter baik justru akan membuat mereka tersisih dan menjadi makhluk aneh? Bagaimana anak bangsa akan bersikap ketika dihadapkan pada realitas bahwa sosok yang jujur dan bertanggung jawab di negeri ini hanyalah menjadi bagian dari cerita dongeng pengantar tidur karena yang berkuasa dan menguasai adalah mereka yang berani berbuat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab?

Karena itulah jalan utama melahirkan manusia-manusia berkarakter baik di negeri ini adalah dengan menciptakan pemimpin-pemimpin yang bisa memberi keteladanan. Demokrasi sesungguhnya sudah memberi ruang yang sangat luas bagi terciptanya pemimpin yang bisa menjadi teladan baik bagi masyarakat. Caranya sangat sederhana, pilihlah mereka yang memiliki karakter yang baik, atau mereka yang bisa memberi inspirasi semangat kejujuran dan bertanggung jawab sebagai pemimpin.

Pendidikan karakter akan menjadi sangat berguna, apabila masyarakat negeri ini memang memberikan tempat terhormat bagi manusia yang berkarakter baik. Pendidikan karakter hanyalah akan menjadi kesia-siaan belaka apabila para pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Belajar dari tokoh-tokoh besar sejarah di Indonesia, lahirnya pemimpin tidak lepas dari pendidikan, seperti pesantren dan lembaga pendidikan Ki Hajar Deantoro, KH. Ahmad Dahlan, HOS. Cokroaminoto dan sebagainya. Maka Revitalisasi pendidikan menjadi maintream utama perubahan karakter bangsa.

Contoh Sistem Pendidikan Karakter:

Menurut Ismail (2010) Pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan proses pendidikan yang diorganisasikan secara formal berdasarkan struktur hierikis dan kronologis, dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Selain mengacu pada tujuan pendidikan yang diterapkan secara berjenjang, berlangsungnya proses pendidikan di sekolah sangat bergantung pada keberadaan subsistem-subsistem lain yang terdiri atas: peserta didik; manajemen penyelenggaraan sekolah; struktur dan jadwal waktu kegiatan belajar-mengajar; materi bahan pengajaran yang diatur dalam seperangkat sistem yang sistemis atau yang disebut sebagai kurikulum; tenaga pendidikan; alat bantu belajar (buku tes, papan tulis, laboratorium, dan audiovisual); teknologi yang terdiri dari perangkat lunak (strategi dan taktik pengajaran) serta perangkat keras (peralatan pendidikan); fasilitas atau kampus beserta perlengkapannya; kendali mutu yang bersumber atas target pencapaian tujuan; penelitian untuk pengembangan kegiatan pendidikan; dan biaya pendidikan guna melancarkan kelangsungan proses pendidikan.

Pendidikan formal dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- Kurikulum pendidikan, mata ajaran, dan metodologi pendidikan disusun berdasarkan pada Aqidah Islam.
- Tujuan penyelenggara pendidikan Islam merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan Islam yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
- Sejalan dengan tujuan pendidikannya, waktu belajar untuk ilmu-ilmu Islam (tsaqofah Islamiyyah) diberikan dengan proporsi yang disesuaikan dengan pengajaran ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keahlian).
- Pelajaran ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keahlian) dibedakan dari pelajaran guna membentuk *syakhsiyyah Islamiyyah* dan *tsaqofah Islamiyyah*. Materi untuk membentuk *syakhsiyyah Islamiyyah* mulai diberikan di tingkat dasar sebagai materi pengenalan dan kemudian meningkat pada pembentukan dan peningkatan setelah usia peserta didik menginjak *baligh* (dewasa). Sementara materi *tsaqofah Islamiyyah* dan pelajaran ilmu-ilmu kehidupan diajarkan secara bertingkat dari mulai tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.
- Bahasa Dunia seperti Arab dan Inggris menjadi bahasa pengantar di seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta.
- Materi pelajaran yang bermuatan pemikiran, ide dan hukum yang bertentangan dengan Islam, seperti ideologi sosialis/komunis atau liberal/kapitalis, aqidah ahli kitab dan lainnya termasuk sejarah asing, bahasa maupun sastra asing dan lainnya, hanya diberikan pada tingkat pendidikan tinggi yang tujuannya hanya untuk pengetahuan, bukan untuk diyakini dan diamalkan.
- Pendidikan di sekolah tidak membatasi usia. Yang ada hanyalah batas usia wajib belajar bagi anak-anak, yakni mulai umur 7 tahun berdasarkan pada hadits: *"Perintahkanlah anak-anak mengerjakan shalat di kala mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkan shalat pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka (pada usia tersebut pula)".* (HR. Al-Hakim dan Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin Ash).
- Penyelenggara kegiatan olah raga dilangsungkan secara terpisah bagi murid laki-laki dan perempuan.
- Pendidikan diselenggarakan oleh negara secara gratis atau murah.

Swasta bisa menyelenggarakan pendidikan asal visi, misi dan sistem pendidikan yang dikembangkan tidak keluar dari ajaran Islam.

Kurikulum pendidikan Islam disekolah dijabarkan dalam tiga komponen utama, yakni: (1) Pembentukan *Syakhsiyyah Islamiyyah* (Kepribadian Islam), (2) *Tsaqofah* Islam dan (3) Ilmu Kehidupan (Iptek dan Keahlian).

Jenjang Pendidikan	TK	SD	SMP	SMU	PT
Komponen Materi					
Syakhsiyyah Islamiyyah	Dasar-dasar		Pembentukan Dan Kematangan		
					5
Tsaqofah Islam				4	5
			3		
		2			
	1				
Ilmu Kehidupan				4	5
			3		
		2			
	1				

Tabel Struktur dan performa Komponen Kurikulum

Sebagaimana yang tercermin dalam tabel diatas, selain muatan penunjang proses pembentukan syakhsiyyah Islamiyyah yang secara terus menerus diberikan pada tingkat TK-SD dan SMP-SMU-PT, muatan *Tsaqofah* Islam dan Ilmu kehidupan (Iptek dan Keahlian) diberikan secara bertingkat sesuai dengan daya serap dan tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan jenjang pendidikannya masing-masing.

Pada tingkat dasar atau menjelang usia baligh (TK dan SD), susunan struktur kurikulum sedapat mungkin bersifat mendasar, umum, berpadu dan merata bagi semua peserta didik yang mengikutinya. Yang termasuk dalam materi dasar ini antara lain: pengenalan Al-Qur'an dari segi harfiah dan bacaan; prinsip-prinsip agama; membaca; menulis dan menghitung; prinsip bahasa Arab; menulis halus; sirah Rasul dan Khulafaur Rasyidin serta berlatih berenang dan menunggang kuda.

Dana, Sarana, Prasarana

Berdasarkan sirah Nabi SAW dan tarikh daulah Khilafah sebagaimana disarikan

oleh Al-Baghdadi (1996) dalam buku sistem Pendidikan Di Masa Khilafah Islam, negara memberikan pelayanan pendidikan cuma-cuma (bebas biaya) dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) sebaik mungkin. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan. dana pendidikan ditanggung negara yang diambil dari *baitul maal*. Sistem pendidikan bebas biaya dilakukan oleh para sahabat (ijma) termasuk pemberian gaji yang sangat memuaskan kepada para pengajar yang diambil dari *baitul maal*.

Kendala

Model pendidikan seperti itu jelas hanya dapat diterapkan oleh negara karena negaralah yang memiliki seluruh otoritas yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, termasuk penyediaan dana yang mencakupi, sarana, prasarana, yang memadai dan sumberdaya manusia yang bermutu. Dalam membangun model pendidikan sebagaimana yang dikehendaki Islam saat ini tentu saja akan menghadapi kendala utama, yakni belum diterapkannya bangunan sistem Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya

Mengingat kendala diatas, maka tahap pertama bisa ditempuh aksi individual atau kelompok yang dibenarkan oleh hukum syara dan memenuhi persyaratan sebagai lembaga pendidikan Islam, dari mulai asas kurikulumnya hingga operasionalisasi pendidikan keseharian. Tahap berikutnya, secara simultan bersamaan dengan tahap pertama tadi harus diperjuangkan tegaknya sistem pendidikan Islam oleh negara sebagai bagian dari sistem Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tahap pertama perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bermutu bagi anak-anak Islam sekarang ini, yang diharapkan bisa menjadi fondasi penting bagi pembentukan kepribadian Islam dalam dirinya dalam rangka tumbuhnya tunas-tunas Islam yang amat diperlukan bagi dakwah. Tapi kegiatan ini tidak boleh melupakan agenda besar lainnya, yakni perjuangan penegakkan kehidupan Islam yang didalamnya aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk di bidang pendidikan, diatur dengan syari'ah. Hanya dengan cara itu saja, kerahmatan syari'ah dapat benar diwujudkan. Insya Allah.

Pendidikan Pemimpin Berkarakter

Pendidikan mau tidak mau selalu ditempatkan sebagai pusat kader dalam level-level yang berjenjang. Pendidikan dipandang sebagai pencetak manusia-manusia berkarakter tidak lain adalah bertujuan untuk mengisi ruang kepemimpinan nasional. Sebuah bangsa (*nation*) dan negara (*state*) tidak akan maju tanpa ditopang oleh seorang pemimpin yang berkarakter. Seorang pemimpin yang mempunyai tingkat kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) yang memadai ditunjukkan dengan karakter-karakter yang terintegrasi dalam praktek memimpin.

Lorg (2007) menyebutkan karakter yang diperlukan oleh seorang pemimpin besar, yaitu *the nine qualities are: Integrity, Security, Purity, Humility, Servanthood, Wisdom,*

Discipline, Courage, and Passion. Pemimpin adalah dekat dengan nilai-nilai Tuhan, bahkan hal yang terpenting *“becoming the leader God intends me to be rather than doing the leading God intends me to do.”*

Malphurs (2004) menyebutkan bahwa pemimpin yang berbasis moral dilahirkan oleh lembaga agama, seperti seminari. Dari sanalah dapat dilahirkan pemimpin yang cakap, terpercaya, berpengaruh, melayani, diikuti dan beragama. Pemimpin keagamaan memiliki kelebihan dibandingkan kepemimpinan biasa, yaitu situasi yang membentuk karakter yang baik.

Berbeda dengan Malphurs, di Indonesia pemimpin keagamaan sekarang ini terlalu sibuk menyebar dogma-dogma kaku agama yang berkuat pada ritus-ritus mistis dan selalu mengaitkan semua perbuatan pada kehidupan akhirat. Ketakutan akan siksa api neraka dan indahnya kehidupan sorga sebagai moral saja berbau spiritual yang tidak implementatif. Mengacu pada pendapat John Kramp (2006) menjelaskan bahwa seorang pemimpin ibarat kereta yang berjalan lurus dengan totalitas mesinnya dalam hal kerja keras dan jiwa karsa beragamanya. Pemimpin adalah yang melakukan secara aktual meliputi *vision casting, team building, communication, motivation/correction, and celebration -- and gives them the steam they need to always succeed.*

Pemimpin agama terlalu sedikit yang mengajarkan dan memberi teladan nyata tentang bagaimana beragama yang bisa mengangkat harkat martabat kemanusiaan yang bersandar pada sikap dan perilaku jujur bertanggung jawab. Ironisnya lagi, pemimpin agama di negeri ini terlalu sibuk terjun berpolitik untuk merebut kekuasaan dengan menggunakan dalil-dalil agama, tetapi sesungguhnya mereka belum layak menjadi pemimpin. Ketika mereka memimpin sebuah departemen atau birokrasi ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, bahkan menjadi sumber masalah seperti terpidana korupsi, terjebak dalam ketidakberdayaan kolektif.

KESIMPULAN

Menyimak konsep idealisme Plato di atas tersirat makna bahwa sarat seorang menjadi pemimpin negara adalah harus mempunyai karakter yang benar-benar matang, mempunyai kemampuan intelektualitas maupun spiritualitas, melalui berbagai jenjang pendidikan yang berlapis-lapis. Oleh karena itu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tangguh, maka saatnya Indonesia mempunyai pemimpin yang berkarakter tangguh. Untuk mempunyai pemimpin yang berkarakter, maka manusia-manusia Indonesia harus

terlebih dahulu berkarakter. Untuk menuju manusia Indonesia yang berkarakter ini jelas harus melalui optimalisasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. (2001) "Refleksi 4 tahun gerakan mahasiswa", *Makalah* dalam acara Dialog Evaluasi Tatangan Reformasi), Surakarta: BEM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Agus Wijaya, N. Purnomolastu, dan A.J. Tjahjoanggoro (2009) *Kepemimpinan Berkarakter: Telaah tentang Pemimpin Efektif*. Penerbit: Brilian Internasional.
- Hafizh, S (2005) *Mengadili Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah.
- Lorg, J. (2007) *The Character of Leadership: Nine Qualities that Define Great Leader*, Nasvile Tennessee: B& H Publishing Group.
- Kramp, J. (2006) *On Track Leadership: Mastering What Leaders Actually Do*, Nasvile Tennessee: B&H Publishing Group.
- Kompas*, 16 Mei 2011 hal 1 Survei Membuktikan Orba Lebih Baik.
- Malphrus, Aubry (2004) *Value-Driven Leadership: Discovering and Developing Your Values for minstry*, Grand Rafids: Baker Books.
- Maulasadra (2008) *Rezim Demokrasi: Daulat Rakyat dan Tipuan atas Nama Rakyat*, Surakarta: Insight books.
- Muhammad, I. Y. (2010) Menggagas Pendidikan Integratif Dan Optimalisasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Menuju Generasi Shaleh-Muslih. *Makalah Seminar Nasional Pendidikan "Reposisi Peran Pendidikan Menuju Negara Mandiri, Berharga Diri"* di Jogjakarta, 11 Nopember 2010.
- Tempo* (01/02/2011) Kolom Opini: Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan Kita
- Murin, V. (2009) dalam *Republika* 14/03/2009 "Indonesia Butuh Pemimpin Berkarakter Soekarno Soeharto".
- Wahid, S. (2010), *Diskusi Keummatan di Forum Ulama, Tokoh dan Aktivitas Islam* Surakarta, Surakarta.
- Yud, L. (2010), *Karakter Bangsa di Tengah Globalisasi*, Makalah Diskusi Kebangsaan Bandung: Universitas Padjdjaran